

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Partisipasi politik masyarakat merupakan syarat pokok yang harus dilakukan oleh setiap warga negara terutama pada negara yang menganut paham demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat tersebut memiliki kepekaan terhadap setiap masalah politik yang ada serta memiliki keinginan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut telah ikut mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis.

Partisipasi politik merupakan bagian penting dan satu keharusan bagi setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan, untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Namun pada kenyataannya partisipasi politik yang terjadi di masyarakat masih sangat rendah dan belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga proses demokrasi tersebut menjadi terhambat. Hal tersebut terlihat dari pengumuman resmi KPU pada hari Sabtu, 9 Mei 2009 dalam [www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com) disebutkan bahwa:

Suara sah yang terhitung hanya mencapai **104.099.785** suara dari **171 juta** penduduk yang harusnya menggunakan hak suara dengan benar. Dari 171 juta penduduk tersebut, sekitar 10% yakni 17.488.581 penduduk menggunakan suara keliru/salah sehingga menyebabkan suara tidak sah. Sehingga ada **66,9 juta (67 juta) “Golput”** atau suara penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan tepat.

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu sangat rendah dan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan tepat, dengan adanya perilaku tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah.

Tingkat partisipasi politik yang rendah telah dianggap sebagai salah satu tanda bahwa warga negara tidak memiliki kepekaan serta perhatian terhadap masalah kenegaraan. Asraf, M. (dalam Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 94)

menyebutkan bahwa ‘partisipasi masyarakat dalam Pemilu ditandai dengan kehadiran masyarakat di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suaranya’. Welch (dalam Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 95) mengemukakan bahwa:

Ketidakhadiran seseorang dalam Pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih, apabila seorang memperoleh keuntungan finansial dengan ketidakhadiran di TPS untuk memberikan hak suaranya, maka dipastikan bahwa orang tersebut tidak akan hadir di TPS, begitu juga sebaliknya.

Sedangkan Lipset (dalam Komalasari & Syaifullah, 2009, hlm. 94) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakhadiran pemilih untuk tidak memberikan suaranya dalam empat kategori, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan kebijakan pemerintah . kelompok yang mempunyai kepentingan secara langsung dengan kebijakan pemerintah menunjukkan tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Kedua, akses terhadap informasi. Seseorang yang mempunyai akses informasi yang lebih lengkap akan cenderung tinggi tingkat kehadirannya. Ketiga, berkaitan dengan tekanan untuk memilih atau tidak memilih dari kelompok tertentu. Jika tekanan kelompok tertentu untuk tidak memilih terlalu kuat dan calon pemilih terpengaruh, maka hal ini makna disikapi dengan tidak hadir di TPS. Keempat, berkaitan dengan adanya tekanan menyilang (*cross pressure*). Ketika seseorang ditekan untuk memilih partai yang berbeda, mereka mungkin menyelesaikan konflik ini dengan menarik diri sama sekali dari pemilihan.

Selain alasan yang disebutkan di atas, ketidakhadiran masyarakat di TPS dapat disebabkan pula oleh pesatnya kemajuan teknologi yang menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi. Namun, dengan kemudahan akses tersebut tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat menjadi tidak tanggap dan cenderung apatis dalam menyikapi berbagai isi dan pemberitaan yang muncul dari berbagai media yang lebih banyak menampilkan sisi negatif dari seseorang, baik itu yang termuat dalam media cetak maupun dalam media elektronik.

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya penurunan angka partisipasi warga negara, maka perlu ditingkatkan efektivitas pendidikan politik. Pendidikan

politik harus dilakukan agar masyarakat menjadi lebih tanggap dan paham akan setiap permasalahan politik yang ada. Sumantri (dalam Wuryan & Syaifullah, 2008, hlm. 71) yang menyatakan bahwa:

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta dan kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan politik (*political education*) sebagai salah satu konsep dari ilmu politik yang berkenaan dengan bagaimana usaha yang dilakukan agar warga negara atau masyarakat dapat memahami dan mengerti politik. Paham demokrasi sangat menjunjung tinggi hak-hak dasar sebagai manusia, salah satu contohnya adalah bahwa setiap orang memiliki satu hak kebebasan, baik itu kebebasan dalam berekspresi, berkeyakinan maupun berperilaku. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara harus dilandasi dengan kesadaran politik dan oleh sebab itu maka pendidikan politik dilakukan dengan tujuan agar partisipasi politik masyarakat dapat lebih meningkat.

Budiardjo (2009, hlm. 367) mengemukakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam undang-Undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Mengingat partisipasi politik sangat penting maka akan dilakukan sebuah penelitian tentang bagaimana partisipasi politik yang berlangsung pada satu wilayah khususnya pada masyarakat desa. Siswopangripto & Sastrosupono (1984, hlm. 20) mendefinisikan masyarakat pedesaan sebagai “masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang masih hidup melalui dan di dalam suasana , cara, pemikiran pedesaan”.

**Intan Fathonah Nur'Aziza, 2015**

***Partisipasi politik masyarakat desa Sukaasih kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu legislatif tahun 2014***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Irawan, Ali, 2012) yaitu “Kajian Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. Dalam penelitian tersebut dikaji bagaimana partisipasi politik yang terjadi pas masyarakat adat. Namun pada penelitian kali ini, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang partisipasi politik dengan objek yang berbeda, yakni penelitian ini akan dilaksanakan pada masyarakat desa yang berbeda di wilayah cukup strategis dan merupakan salah satu desa yang berkedudukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 3 huruf b peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, desa tersebut yakni di Desa Sukaasih.

Desa Sukaasih berlataskan di Jalan K.H.Z Mustofa 46415 Kecamatan Singaparna. Desa ini memiliki karakteristik unik untuk diteliti bagaimana pola partisipasi politik masyarakat pada saat proses Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014. Masyarakat Desa Sukaasih dapat dikatakan cukup melek terhadap akses informasi dan komunikasi, karena hampir setiap rumah memiliki fasilitas televisi, radio dan sebagainya.

Alat komunikasi seperti telepon rumah atau *handphone* turut mendukung kelancaran akses informasi masyarakatnya. Namun seperti fakta yang peneliti temukan di lapangan bahwa minat baca masyarakat Desa Sukaasih masih tergolong sangat rendah, hal tersebut lebih disebabkan karena kesibukan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Selain itu, dengan komisi ekonomi saat ini daya beli masyarakat terhadap bahan bacaan seperti buku, majalah atau koran masih sangat rendah.

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh jumlah penduduk Desa Sukaasih tercatat sebanyak 4.358 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.184 KK, jumlah KK laki-laki sebanyak 984 orang dan jumlah KK perempuan sebanyak

200 orang. Dari jumlah tersebut terhitung 2.346 orang diantaranya adalah penduduk laki-laki dan sisanya 2.012 orang adalah penduduk perempuan yang usianya beragam antara balita, usia sekolah sampai dengan manula.

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Sukaasih

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-laki     | 2.346  |
| Perempuan     | 2.012  |
| Jumlah        | 4.358  |

Sumber: Profil Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukaasih tergolong cukup maju terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai menempuh gelar sarjana (S1) sebanyak 52 orang, master (S2) sebanyak 7 orang, dan mendapat gelar doktor (S3) sebanyak 1 orang. Dalam bidang politik seperti yang tergambar pada pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu 3.382 orang penduduk telah memiliki hak pilih. Dan diantaranya telah menggunakan hak pilih yang dimiliki kecuali bagi mereka yang sedang bekerja atau belajar di perantauan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pola partisipasi politik masyarakat Desa Sukaasih dalam proses Pemilu Legislatif 2014, untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DESA SUKAASIH KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014”**.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menentukan batasan permasalahan sehingga lebih terfokus pada teori dan variabel serta keterkaitan antar variabel yang akan diteliti, maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi politik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan satu keharusan bagi setiap warga negara sebagai pemilik kedaulatan untuk ikut serta dalam proses demokrasi.
2. Partisipasi politik yang terjadi di masyarakat masih sangat rendah dan belum sesuai yang diharapkan, sehingga proses demokrasi menjadi terhambat dan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Intan Fathonah Nur'Aziza, 2015

*Partisipasi politik masyarakat desa Sukaasih kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya dalam pemilu legislatif tahun 2014*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Tingkat partisipasi politik yang rendah dianggap sebagai salah satu tanda bahwa warga negara tidak memiliki kepekaan serta perhatian terhadap masalah kenegaraan.
4. Kemudahan dalam mengakses informasi selain dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, salah satunya dapat menyebabkan masyarakat cenderung bersikap apatis menanggapi berbagai masalah dan isu yang muncul di media massa terutama pemberitaan yang bersifat *bad news* baik itu yang muncul dalam media cetak maupun media elektronik.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah secara umumnya ialah “Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Legislatif 2014?” yang kemudian difokuskan lagi ke dalam rumusan masalah secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana cara memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik peserta Pemilu di tengah banyaknya anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap munculnya sosok publik figur sebagai peserta dan Pemilu Legislatif 2014?
3. Bagaimana peran media terhadap pembentukan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014?
4. Bagaimana upaya yang efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu Legislatif 2014?

### **D. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapat gambaran secara aktual dan faktual mengenai partisipasi politik

masyarakat Desa Sekaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014.

## **2. Tujuan Khusus**

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis cara memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik peserta Pemilu di tengah banyaknya anggota legislatif yang terjerat kasus korupsi.
- b. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap munculnya sosok publik figur sebagai peserta dalam Pemilu Legislatif 2014.
- c. Untuk menganalisis peran media terhadap pembentukan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2014.
- d. Untuk mengidentifikasi upaya yang efektif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam pemilu legislatif 2014.

## **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

### **1. Manfaat/Signifikansi Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menggali dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014, sehingga kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi akan terlaksana dengan baik dan selaras. Selain itu, diharapkan masyarakat Desa Sukaasih memiliki tingkat kepedulian dan partisipasi yang tinggi terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

### **2. Manfaat/Signifikansi Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat yang ada di lingkungan Desa Sukaasih dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Bagi departemen Pendidikan Kewarganegaraan sendiri penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam proses pembelajaran

sebagai salah satu contoh realita partisipasi politik masyarakat yang terjadi di lingkungan Desa Sukaasih. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dan partisipasi politik yang ada di lingkungan wilayah Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

### **3. Manfaat/Signifikansi Secara Kebijakan**

Ilmu Kewarga negaraan (*civics*) mempunyai hubungan erat dengan ilmu politik. *Civics* sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat mengenai bagaimana seorang warga harus memiliki kepedulian dan keikutsertaan dalam setiap proses pengambilan keputusan, karena masyarakat merupakan pemilik kedaulatan dan memiliki peran yang sangat besar dalam proses tersebut. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu ikut berperan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang baik.

### **4. Manfaat/Signifikansi Secara Isu**

Gejolak perbedaan pendapat dan kata hati merupakan proses yang wajar pada saat proses pengambilan keputusan, namun hal tersebut tidak lantas menjadi penghalang pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar karena hal tersebut merupakan salah satu bagian dari proses ketercapaiannya tujuan.

## **F. Struktur organisasi Skripsi**

Adapun untuk memudahkan dalam penelitian skripsi agar bisa berjalan dengan sistematis. Maka penulis akan membuat sistematika penelitian/struktur organisasi. Struktur organisasi akan disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan: Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi.
2. Bab II Kajian Pustaka: Bab ini berisikan mengenai kajian tentang pengertian partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik, tingkatan partisipasi politik, masyarakat desa, sistem pemilihan umum, fungsi badan legislatif dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu.
3. Bab III Metode Penelitian: Bab ini berisikan lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, tahap-tahap penelitian serta tahap pengolahan dan analisa data.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan penemuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, dan pembahasan hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.
5. Bab V Kesimpulan dan rekomendasi: Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dan rekomendasi yang memaparkan penafsiran peneliti terhadap hasil temuan penelitian.